

Pengaruh Penyerapan Anggaran, Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja Dan Pengawasan Inspektorat Terhadap Kinerja Keuangan Organisasi Publik (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara)

Dimas Estu Priagung

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman

dimashanestu23@gmail.com

Edward K. Sinoeraya Mafudi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman

ABSTRACT

This study aims to determine the absorption of the budget, organizational culture, job satisfaction and supervision inspectorate on the financial performance of public organizations. The research object is selected in this study were employees of the SKPD in Banjarnegara district. The research is a qualitative research with empirical studies. Criteria respondents used in this study are employees who work on the part relating to the study variables. The sample used by 54 respondents. Data collection methods used with a questionnaire consisting of five instruments by using Likert scale. Of the 54 questionnaires that have been distributed, the number of questionnaires returned by 54 questionnaires and can be analyzed. Data analysis technique used is test the quality of data consisting of validity and reliability test, test the classical assumption of normality test, multicollinearity and test heterostisitas, and hypothesis testing consisting multiple regression coefficient determines test, t test and F. These results indicate that (1) absorption positive significant effect on the financial performance of public organizations (2) organizational culture positive significant effect on the financial performance of public organizations (3) job satisfaction did not significantly affect the financial performance of public organizations (4) supervision inspectorate effect a significant positive financial performance of public organizations.

Keywords: *Absorption budget, organizational culture, job satisfaction, supervision inspectorate, the financial performance of public organizations.*

PENDAHULUAN

Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat terus

dilakukan. Adanya UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, yang diperkuat dengan PP No 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja

instansi pemerintah menyatakan bahwa dalam pelaporan keuangan harus disertakan informasi mengenai kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh pengguna anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan Instansi Pemerintah Daerah yang menerima dan menggunakan anggaran untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, oleh karena itu mempunyai kewajiban untuk membuat akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan suatu perwujudan pertanggungjawaban suatu Instansi Pemerintah Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dalam menjalankan program dan kegiatan untuk melaksanakan misi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kabupaten Banjarnegara sebagai salah satu daerah yang telah memiliki hak otonomi diwajibkan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi perhatian serius bagi aparatur pemerintahan Kabupaten Banjarnegara. Kinerja yang dilakukan aparatur pemerintahan merupakan tuntutan undang-undang yang berlaku melalui perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kinerja kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Sistem akuntabilitas kinerja belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan PP nomor 21 tahun 2004.

Dibandingkan dengan daerah sekitar yang tergabung dalam Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen), total PAD (Pendapatan Asli

Daerah) Kab. Banjarnegara merupakan yang terendah. Dalam tahun 2010, total PAD tertinggi berturut-turut diperoleh oleh Kab. Banyumas (Rp 83,3 milyar), Kab. Cilacap (63,3 milyar), Kab. Kebumen (50,8 milyar), dan Kab. Purbalingga (Rp 43,8 milyar) dan pada tahun 2011 Kabupaten Banjarnegara masih memiliki PAD terendah (71,1 milyar) dan posisi tertinggi adalah Kabupaten Banyumas (193 milyar). Target tahun anggaran 2015 Kabupaten Banjarnegara hanya mematok (136 milyar), Kabupaten Purbalingga (168 Milyar), Kabupaten cilacap (280 Milyar), Kabupaten Banyumas (854 Milyar). Tafsiran bebas dari rendahnya angka rasio PAD terhadap PDRB di Kabupaten Banjarnegara dimungkinkan karena rendahnya kemampuan aparat dan institusi terkait dalam menggali dan mengoptimalkan potensi penerimaan yang ada. Hal ini mencerminkan bahwa kinerja keuangan satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Banjarnegara masih belum maksimal dalam pencapaian pelaksanaan suatu program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi. Adanya sistem otonomi daerah menyebabkan pemerintah daerah diberikan wewenang dalam menemukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri. Kesuksesan pemerintah daerah tersebut sangatlah tergantung dari individu yang terlibat didalamnya khususnya pejabat struktural yang berperan penting dalam perencanaan keuangan organisasi.

Faktor yang tidak kalah penting berpengaruh pada kinerja organisasi adalah budaya organisasi. Budaya organisasi yang baik tentunya akan mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang baik pula. Hal ini sesuai dengan pendapat (Tjiptono, 2000), yang mengemukakan bahwa kualitas pelayanan sendiri sebenarnya dipengaruhi oleh banyak aspek salah

satunya adalah budaya organisasi dan cara pengorganisasiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyono dan Kompyurini (2008), menyimpulkan bahwa budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja organisasi. Budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap perilaku para anggota organisasi, sehingga jika budaya organisasinya baik maka anggota organisasinya adalah orang-orang yang baik dan berkualitas pula. Dan apabila anggotanya baik dan berkualitas, maka kinerja organisasi akan menjadi baik dan berkualitas juga.

Kinerja keuangan organisasi juga dipengaruhi oleh faktor kepuasan kerja karyawan. Kepuasan kerja karyawan merupakan hal yang bersifat individual tentang perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Setiap individu mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda-beda. Kreitner & Kinicki (2005) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai efektivitas atau respons emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Sedangkan Blum As'ad (2000) mengatakan bahwa kepuasan kerja merupakan suatu sikap umum yang merupakan hasil dari beberapa sikap khusus terhadap faktor-faktor pekerjaan, karakteristik individual, serta hubungan kelompok di luar pekerjaan itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan kepuasan kerja adalah perasaan dari individu terhadap pekerjaan, situasi kerja, kerjasama antara pimpinan dan sesama pimpinan dan sesama karyawan dalam sebuah organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Abdulloh (2006) berkesimpulan bahwa kepuasan kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Oleh sebab itu, apabila seorang individu memiliki kepuasan kerja yang tinggi, maka akan menghasilkan kinerja yang tinggi pula.

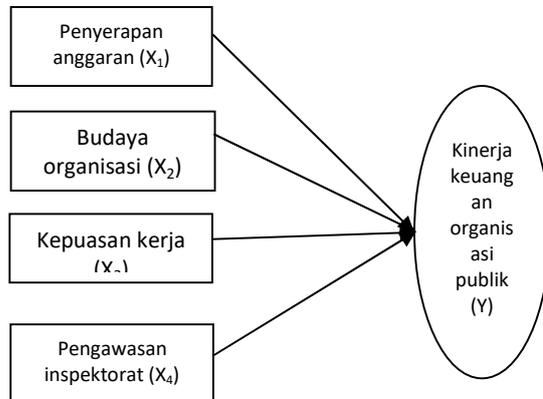
Adapun faktor yang

memengaruhi kinerja keuangan organisasi publik lainnya yaitu pengawasan inspektorat yang berfungsi untuk mereview laporan keuangan pemerintah daerah juga untuk membantu instansi menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut (Sari, 2015). Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang inspektur yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada bupati. Tujuan utama dari pengawasan inspektorat ini adalah tidak hanya untuk melakukan tindakan verifikasi melainkan juga dimaksudkan untuk membantu pihak yang diawasi dalam menunaikan tugasnya secara baik guna meningkatkan kinerja. Dalam tatanan otonomi pemerintah indonesia, pelaksanaan fungsi ini dilaksanakan oleh inspektorat daerah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul di atas. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui; pengaruh penyerapan anggaran terhadap kinerja keuangan SKPD di Kabupaten Banjarnegara; pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja keuangan SKPD di Kabupaten Banjarnegara; pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja keuangan SKPD di Kabupaten Banjarnegara; pengaruh pengawasan inspektorat terhadap kinerja keuangan SKPD di Kabupaten Banjarnegara.

PERUMUSAN MODEL PENELITIAN DAN HIPOTESIS

Perumusan Model Penelitian



Hipotesis

- H₁ : Penyerapan anggaran memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan organisasi publik
- H₂ : Budaya organisasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan organisasi publik.
- H₃ : Kepuasan kerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan organisasi publik.
- H₄ : Pengawasan inspektorat memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan organisasi publik.

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Kinerja Keuangan Organisasi publik (Y)
Kinerja keuangan organisasi publik adalah ukuran laporan keuangan setiap SKPD yang didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat dalam mengevaluasi keputusan alokasi sumber dana.

2. Penyerapan Anggaran (X₁)

Penyerapan Anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran.

3. Budaya Organisasi (X₂)

Budaya organisasi, merupakan kumpulan nilai-nilai yang membantu anggota organisasi memahami tindakan yang dapat diterima dan mana yang tidak dapat diterima dalam organisasi. Nilai-nilai tersebut biasanya dikomunikasikan melalui cerita-cerita atau simbol-simbol lain yang mempunyai arti tertentu bagi organisasi.

4. Kepuasan Kerja (X₃)

Kepuasan kerja, merupakan perasaan karyawan tentang menyenangkan atau tidaknya pekerjaan mereka yang merupakan hasil persepsi pengalaman selama masa kerjanya. Kepuasan kerja berhubungan dengan sikap dari karyawan terhadap pekerjaan itu sendiri, situasi kerja, kerjasama antara pimpinan dan sesama pimpinan dan sesama karyawan.

5. Pengawasan Inspektorat (X₄)

Pengawasan inspektorat, merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja untuk pengawasan yang optimal. Dalam pelaksanaannya pengawasan diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan di daerah harus diikuti pengawasan yang kuat.

Teknik Analisis Data

Suatu penelitian membutuhkan analisis data dan interpretasinya yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti dalam rangka mengungkap fenomena sosial tertentu. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode yang dipilih untuk menganalisis data harus sesuai dengan pola penelitian dan variabel yang akan diteliti.

Uji kualitas data digunakan untuk mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga data yang diperoleh dalam suatu penelitian harus merupakan data yang valid dan reliabel, uji kualitas data antara lain:

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menunjukkan sejauh mana pengukuran itu dapat memberikan konsistensi dan stabilitas bila dilakukan pengukuran kembali terhadap obyek yang sama.

Sebelum melakukan analisis linear berganda, terlebih dulu dilakukan uji asumsi klasik, dengan melakukan beberapa asumsi, antara lain:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diteliti berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji *Kolgomorov-Smirnov*.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi antar variabel bebas.

3. Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi terjadi kesalahan atau residual dari model yang diamati tidak memiliki *variance* yang konstan dari pengamatan satu ke pengamatan lainnya.

Analisis regresi linear berganda (*multiple regression*) dilakukan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen (*explanatory*) terhadap suatu variabel dependen (Ghozali, 2007).

Uji *goodness of fit* digunakan untuk untuk mengetahui seberapa jauh model penelitian yang telah disusun dapat menunjukkan keadaan yang sebenarnya (Suliyanto, 2005: 89). Uji *goodness of fit* antara lain:

1. Koefisien Determinasi

2. Uji statistik F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Uji statistik t merupakan alat untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2007).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini yaitu aparat pemerintah yang berada di Satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Banjarnegara. Dari 54 buah kuesioner yang dibagikan, sebanyak 54 kuesioner dikembalikan. Berdasarkan kuesioner yang telah dianalisis didapatkan informasi tentang gambaran umum responden yang dapat dilihat pada tabel 1, sebagai berikut :

Tabel 1.
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kinerja keuangan	54	3.43	4.57	4.1772	.21663
Penyerapan anggaran	54	2.80	4.00	3.0315	.17785
Budaya organisasi	54	3.30	4.70	4.4315	.25538
Kepuasan kerja	54	3.10	4.50	3.8796	.30738
Pengawasan inspektorat	54	3.75	4.75	4.3194	.26115
Valid N (listwise)	54				

Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan bahwa pada variabel penyerapan anggaran (X_1) mempunyai nilai terendah 2,80 dan nilai tertinggi 4,00, sehingga diperoleh skor jawaban rata-rata (*mean*) 3.0315 yang apabila dibagi dengan 10 butir pertanyaan maka diperoleh rata-rata jawaban responden pada skala 3 (setuju). Kesimpulannya bahwa penyerapan anggaran yang dilakukan oleh SKPD Kabupaten Banjarnegara sudah berjalan dengan cukup tinggi.

Variabel budaya organisasi (X_2) jawaban nilai terendah bernilai 3,30 dan jawaban nilai tertinggi bernilai 4,00, sehingga diperoleh skor jawaban rata-rata (*mean*) 4,4315 yang apabila dibagi dengan 10 butir pertanyaan diperoleh rata-rata jawaban responden adalah pada skala 3 (setuju). Kesimpulannya, budaya organisasi pada SKPD Kabupaten Banjarnegara sudah cukup tinggi.

Variabel kepuasan kerja (X_3) memiliki jawaban nilai terendah 3,10 dan nilai tertinggi 4,50, sehingga diperoleh skor jawaban rata-rata (*mean*) 3,8796 yang apabila dibagi dengan 10 butir pertanyaan diperoleh rata-rata jawaban responden terdapat pada skala 3 (setuju). Hal ini berarti bahwa kepuasan kerja aparat SKPD Kabupaten Banjarnegara sudah cukup tinggi.

Variabel pengawasan inspektorat (X_4) jawaban nilai terendah 3,75 dan nilai tertinggi 4,75, sehingga

diperoleh skor jawaban rata-rata (*mean*) 4,3194, yang apabila dibagi dengan 3 butir pertanyaan diperoleh rata-rata jawaban responden adalah pada skala 3 (setuju). Kesimpulannya, pengawasan inspektorat yang ada di SKPD Kabupaten Banjarnegara sudah cukup tinggi.

Variabel kinerja keuangan SKPD (Y) memiliki nilai terendah 3,43 dan nilai tertinggi 4,57, sehingga diperoleh skor jawaban rata-rata (*mean*) 4,1772 yang apabila dibagi dengan 5 butir pertanyaan akan diperoleh rata-rata jawaban responden berada pada skala 3 (setuju). Kesimpulannya, kinerja keuangan SKPD di Kabupaten Banjarnegara sudah cukup tinggi.

Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Berdasarkan ringkasan hasil uji validitas dapat diketahui bahwa nilai $r_{hitung} Product Moment Correlation$ setiap item pertanyaan kuesioner pada variabel Penyerapan anggaran (X_1), Budaya Organisasi (X_2), Kepuasan Kerja (X_3) dan Pengawasan Inspektorat (X_4) memiliki koefisien lebih besar daripada nilai kritis (r_{tabel}). Dengan demikian maka tiap item pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data

2. Uji Reliabilitas

Tabel 2.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha Cronbach	Keterangan
Kinerja keuangan SKPD	0,570	Reliabel
Penyerapan anggaran	0,484	Reliabel
Budaya organisasi	0,671	Reliabel
Kepuasan kerja	0,575	Reliabel
Pengawasan inspektorat	0,625	Reliabel

Nilai r tabel untuk uji reliabilitas dengan $N = 30$ dan level of signifikansi 5% sebesar 0,364. Berdasarkan tabel di atas ternyata Alpha Cronbach semua variabel di atas 0,364 sehingga semua instrumen penelitian dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov Smirnov* dua arah (Santoso, 2001:92). Apabila nilai Z statistiknya tidak signifikan maka

suatu data disimpulkan terdistribusi normal. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Ghazali (2005:79) yang menyatakan bahwa apabila nilai Z hitung $>$ Z tabel, maka distribusi tidak normal. Uji *Kolmogorov Smirnov* dua arah dilakukan dengan menggunakan tingkat kepercayaan 5%. Bahkan agar lebih sederhana, pengujian ini dapat dilakukan dengan tingkat probabilitas dari *Kolmogorov Smirnov Z* statistik. Pada tabel di bawah ini akan disajikan hasil *Kolmogorov Smirnov* dua arah pada tabel 3 sebagai berikut :

Table 3.
Hasil Uji Kolmogorov Smirnov dua arah

Asymp.Sig (2-tailed)	<i>Kolmogorov Smirnov Z</i> statistik	Z tabel	Keterangan
0.489	0.834	1,900	berdistribusi normal

Berdasarkan Tabel 10 terlihat bahwa nilai *Asymptotic Significancy* (2-tailed) adalah 0.489 dan di atas nilai signifikan 0.05. Dengan kata lain variabel residual berdistribusi normal sehingga penelitian layak untuk dilanjutkan.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.
Hasil Uji Multikoleniaritas

Variabel	Tolera nce	VIF
Penyerapan anggaran	0.914	1.095
Budaya organisasi	0.792	1.263
Kepuasan kerja	0.872	1.147
Pengawasan inspektorat	0.785	1.274

Hasil uji multikolinearitas yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai tolerance yang dihasilkan pada semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini nilainya lebih besar dari 0,10 dan VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	t statistik	Signifikansi
Penyerapan	-0.102	0.919

Tabel 6.
Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

No	Variabel	Koefisien regresi	Sig.
1.	Konstanta	0.175	
2.	Penyerapan anggaran	0.162	0.029
3	Budaya organisasi	0.364	0.000
4	Kepuasan kerja	0.049	0.257
5	Pengawasan inspektorat	0.177	0.010

*AdjustedR*² = 0,653, F tabel 2,39
F hitung = 25.920, Konstanta = 0,175

Sesuai dengan kaidah dalam melakukan analisis regresi berganda bahwa suatu persamaan regresi harus memiliki data yang terdistribusi normal, bebas multikolinearitas, bebas heteroskedastisitas dan bebas autokorelasi agar di peroleh persamaan regresi yang baik dan tidak bias. Berdasarkan pengujian yang dilakukan dengan menggunakan *software SPSS 22.0 for windows* diperoleh persamaansebagai berikut:

anggaran		
Budaya organisasi	-0.009	0.993
Kepuasan kerja	0.304	0.762
Pengawasan inspektorat	-0.268	0.790

Dari tabel hasil pengujian heteroskedastisitas di atas dapat diketahui nilai Sig. dari setiap variabel lebih besar dari nilai alphanya yakni 0,05, yang mengartikan bahwa model regresi penelitian ini tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

$$\hat{Y} = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

$$Y = 0,175 + 0.162X_1 + 0.364X_2 + 0.049X_3 + 0.177X_4$$

Nilai konstanta sebesar 0.175 menunjukkan jika variabel Penyerapan Anggaran, Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja dan Pengawasan Inspektorat tidak mengalami perubahan atau konstan, sehingga variabel Kinerja Keuangan Organisasi Publik akan

bersifat positif atau mengalami peningkatan.

Nilai koefisien regresi variabel Penyerapan Anggaran sebesar 0.162 menunjukkan bahwa variabel Penyerapan Anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Organisasi Publik, atau secara fungsional dapat dinyatakan jika tingkat Penyerapan Anggaran meningkat sebesar satu satuan skor, maka akan dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Organisasi Publik sebesar 0.091 satuan skor dengan menganggap variabel lain tetap.

Nilai koefisien regresi variabel Budaya Organisasi sebesar 0.364 menunjukkan bahwa variabel Budaya Organisasi mempunyai pengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Organisasi Publik, atau secara fungsional dapat dinyatakan jika tingkat Budaya Organisasi meningkat sebesar satu satuan skor, maka akan dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Organisasi Publik sebesar 0.364 satuan skor dengan menganggap variabel lain tetap.

Nilai koefisien regresi variabel Kepuasan Kerja sebesar 0.049 menunjukkan bahwa variabel Kepuasan Kerja mempunyai pengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Organisasi Publik, atau secara fungsional dapat dinyatakan jika tingkat Kepuasan Kerja meningkat sebesar satu satuan skor, maka akan dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Organisasi Publik sebesar 0.049 satuan skor dengan menganggap variabel lain tetap.

Nilai koefisien regresi variabel Pengawasan Inspektorat sebesar 0.177 menunjukkan bahwa variabel Pengawasan Inspektorat mempunyai pengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Organisasi Publik, atau secara fungsional dapat dinyatakan jika tingkat Pengawasan Inspektorat meningkat sebesar satu satuan skor,

maka akan dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Organisasi Publik sebesar 0.177 satuan skor dengan menganggap variabel lain tetap.

Analisi Uji F

Berdasarkan pada tabel 6 diketahui nilai F_{hitung} sebesar 25.920 dan signifikansi 0,000, dengan *degree of freedom* (k-1), (n-1) sebesar (6-1), (60-6) diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 2,39. Oleh karena F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} yaitu $25.920 > 2,39$ dan signifikansi $0,00 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel penyerapan anggaran, budaya organisasi, kepuasan kerja, dan pengawasan inspektorat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap motivasi manajemen dalam melakukan kinerja keuangan organisasi publik.

Uji Statistik t

Dari hasil ringkasan uji t, dapat diketahui bahwa:

1. Variabel penyerapan anggaran memiliki tingkat keyakinan 95 persen ($\alpha = 0,05$) dan *degree of freedom* ($df = (n - k)$), diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,001. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa hubungan variabel penyerapan anggaran dengan kinerja keuangan SKPD memiliki nilai signifikansi 0,029 dan 2,243. Nilai signifikansi ($p = 0,029$) $\leq 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,243 > 2,001$), artinya pernyataan dalam hipotesis pertama didukung dalam penelitian ini. Dengan demikian variabel penyerapan anggaran secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan SKPD, sehingga hipotesis pertama diterima.
2. Variabel budaya organisasi memiliki tingkat keyakinan 95 persen ($\alpha = 0,05$) dan *degree of freedom* ($df = (n - k)$), diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,001. Hasil

pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa hubungan variabel budaya organisasi dengan kinerja keuangan SKPD memiliki nilai signifikansi 0,000 dan 6,738. Nilai signifikansi $\leq 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6,738 > 2,001$), artinya pernyataan dalam hipotesis kedua didukung dalam penelitian ini. Dengan demikian variabel budaya organisasi secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan SKPD. Dengan demikian hipotesis kedua diterima.

3. Variabel kepuasan kerja memiliki tingkat keyakinan 95 persen ($\alpha = 0,05$) dan *degree of freedom* (df) = $(n - k)$, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,001. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa hubungan variabel kepuasan kerja dengan kinerja keuangan SKPD memiliki nilai signifikansi 0,257 dan 1,147. Nilai signifikansi $> 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($1,147 < 2,000$), artinya pernyataan dalam hipotesis ketiga didukung dalam penelitian ini, sehingga hipotesis ketiga ditolak.
4. Variabel pengawasan inspektorat memiliki tingkat keyakinan 95 persen ($\alpha = 0,05$) dan *degree of freedom* (df) = $(n - k)$, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,001. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa hubungan variabel pengawasan inspektorat dengan kinerja keuangan SKPD memiliki nilai signifikansi 0,010 dan 2,675. Nilai signifikansi $\leq 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,675 > 2,000$), artinya pernyataan dalam hipotesis keempat didukung dalam penelitian ini. Dengan demikian variabel pengawasan inspektorat secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan SKPD,

sehingga hipotesis keempat diterima.

Pembahasan

1. Hubungan antara penyerapan anggaran terhadap kinerja keuangan organisasi publik, yaitu sebagai berikut :

Hasil analisis data menunjukkan $p < 0,05$ yang berarti terbukti penyerapan anggaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan organisasi publik pada SKPD di Kabupaten Banjarnegara. Dengan demikian dalam menjalankan roda pemerintahan peran pemerintah sebagai pengelola keuangan Negara sangatlah penting untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan tersebut tercermin dalam APBD, yang mana APBD diharapkan dapat digunakan dan dikelola secara tepat waktu dan tepat sasaran sehingga realisasi anggaran pun dapat terserap secara optimal.

Secara keseluruhan setiap SKPD di Banjarnegara sudah mampu melakukan fungsi penyerapan anggaran. Kemampuan ini didukung dari faktor pendidikan yang sebagian besar (59,3%) mempunyai strata pendidikan S1. Selain faktor pendidikan bahwa pengalaman bekerja yang dapat dilihat dari usia pegawai dapat menjelaskan kemampuan pegawai dalam melakukan penyerapan anggaran karena 46,2% termasuk pegawai sudah berpengalaman.

Anggaran sebagai salah satu sumber dana yang digunakan dalam kegiatan membangun guna kepentingan masyarakat pada penyusunannya harus memperhitungkan kemungkinan

rencana belanja dana yang baiknya digunakan secara efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan fungsi anggaran sebagai alat perencanaan. Perencanaan anggaran tersusun dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dokumen perencanaan memuat kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan secara utuh sasaran hasil kinerja pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang disebut dengan rencana kerja. Setiap Rencana Kerja menjadi landasan dalam pelaksanaan koordinasi dan monitoring implementasi rencana dalam maksud menghasilkan setiap sasaran hasil kinerja pembangunan. Rumusan hipotesis antara penyerapan anggaran dengan kinerja keuangan organisasi publik.

2. Hubungan antara budaya organisasi dengan kinerja keuangan organisasi publik, yaitu sebagai berikut :

Hasil analisis data menunjukkan $p < 0,05$ yang berarti terbukti budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan organisasi publik pada SKPD di Kabupaten Banjarnegara. Budaya organisasi mengikat para karyawan yang bekerja didalamnya untuk berperilaku sesuai dengan budaya organisasi yang ada. Apabila pengertian ini ditarik ke dalam organisasi, maka seperangkat norma sudah menjadi budaya dalam organisasi sehingga karyawan harus bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan budaya yang ada tanpa merasa terpaksa. Keberadaan budaya dalam organisasi akan menjadi

perekat dan pedoman dari seluruh kebijakan organisasi publik serta tuntutan operasional bagi aspek-aspek lain dalam organisasi.

Hal ini sesuai dengan temuan Fajrina (2009) yang menyatakan jika nilai-nilai budaya telah menjadi pedoman dalam pembuatan aturan organisasi, maka budaya tersebut akan mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja organisasi. Hal tersebut berarti bila budaya organisasinya baik maka kinerja organisasi juga akan baik. Penelitian yang dilakukan oleh Primanda (2008) berkesimpulan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi.

Budaya organisasi adalah system nilai-nilai yang diyakini oleh semua anggota organisasi dan yang dipelajari, diterapkan, serta dikembangkan secara berkesinambungan, berfungsi sebagai system perekat, dan dapat dijadikan acuan berperilaku dalam perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, sehingga secara langsung atau pun tidak langsung memiliki pengaruh terhadap kinerja organisasi.

3. Hubungan antara kepuasan kerja dengan kinerja keuangan organisasi publik, yaitu sebagai berikut :

Hasil analisis data menunjukkan $p > 0,05$ yang berarti kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan organisasi publik pada SKPD di Kabupaten Banjarnegara. Teori *equitytheory* yang dijelaskan oleh Herzberg (2005) berawal dari adanya ketidakpuasan kerja yang muncul dari seorang individu dalam membandingkan antara memberikan sesuatu (*input*) dalam pertukaran untuk sesuatu yang lain (*output*) dan merasa bahwa posisinya tidak adil.

Kemudian aspek kepuasan kerja akan muncul dimana individu membandingkan apa yang telah dia kerjakan (*input*), harus memiliki nilai yang sama atau sebanding dengan yang diharapkan (*output*). Apabila yang diharapkan individu tidak memiliki nilai yang sama atau tidak sebanding dari yang telah dia kerjakan maka individu tersebut akan menjadi tidak puas. Sebaliknya, apabila yang diharapkan individu memiliki nilai yang sama atau sebanding dari yang telah dia kerjakan maka individu tersebut merasa puas.

Bila kepuasan kerja terjadi, maka perasaan tersebut tercermin pada sikap dan perilaku positif pegawai terhadap pekerjaannya. Pegawai akan melaksanakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh dan segala sesuatu yang dihadapi ataupun ditugaskan kepadanya akan dilakukan dengan baik. Apabila pegawai melakukan pekerjaannya dengan baik, maka kinerja organisasi akan menjadi baik pula. Hal tersebut berarti apabila rasa puas seseorang tinggi maka kinerja organisasi juga akan tinggi.

Kepuasan kerja adalah efek atau respon berupa rasa emosional dari individu terhadap berbagai aspek yang ada di dalam sebuah organisasi. Aspek tersebut dapat berupa rasa senang atau tidak senang, situasi kerja, interaksi dengan orang lain, dan perasaan nyaman akan pekerjaannya itu. Sehingga faktor tersebut memberikan rasa puas kepada individu, dan menjadikan individu itu bekerja lebih keras dan mampu meningkatkan kinerja organisasi.

Hasil penelitian tidak sesuai dengan temuan Lawler (2003) menyatakan bahwa terdapat

hubungan positif antara kepuasan kerja dengan kinerja organisasi. Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian Verawati (2009) yang menyimpulkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi. Kepuasan kerja adalah kondisi yang dirasakan seorang pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Hal tersebut menggambarkan senang tidaknya seorang karyawan bekerja pada sebuah organisasi. Hasil observasi menunjukkan ditemukan adanya rasa iri pada masing-masing pegawai satu dengan yang lain karena beban kerja, padahal kompensasinya sama dan eselonnya juga sama.

4. Hubungan pengawasan inspektorat terhadap kinerja keuangan organisasi publik, yaitu sebagai berikut :

Hasil analisis data menunjukkan $p < 0,05$ yang berarti pengawasan inspektortat berpengaruh terhadap kinerja keuangan organisasi publik pada SKPD di Kabupaten Banjarnegara. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Salvia (2008) meneliti tentang pengaruh pengawasan inspektorat dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja manajerial SKPD. Penelitian ini dilaku kanpada Pemkab Solok, dan hasilnya menunjukkan bahwa pengawasan inspektorat dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial SKPD. Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2012) mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial, diantaranya adalah pengawasan inspektorat berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD.

Menurut Mardi (2008), pengawasan inspektorat memiliki

peran yang sangat strategis, sebagai katalisator dan dinamisator dalam meningkatkan kinerja aparatur dan menyukseskan pembangunan daerah. Fungsi inspektorat dalam proses mereview laporan keuangan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masukan yang diberikan inspektorat dalam proses review ini akan menuntun terwujudnya laporan keuangan SKPD yang sesuai dengan SAP dan akan menggambarkan pencapaian kinerja yang diharapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin baik pengawasan inspektorat maka semakin baik pula kinerja manajerial SKPD tersebut. Selain itu menurut PP No. 41 tahun 2007, tujuan utama dari pengawasan inspektorat tidak hanya untuk melakukan tindakan verifikasi, melainkan juga dimaksudkan untuk membantu pihak yang diawasi dalam menunaikan tugasnya secara baik guna meningkatkan kinerja organisasi yang diawasi oleh pemerintah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil analisis data dengan menggunakan regresi berganda diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kabupaten Banjarnegara.
2. Budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kabupaten Banjarnegara.
3. Kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kabupaten Banjarnegara.

4. Pengawasan inspektorat berpengaruh terhadap kinerja keuangan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kabupaten Banjarnegara

Implikasi

Berdasarkan dari kesimpulan hasil analisis penelitian di atas, maka disarankan sebaiknya pemerintah, sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa penyerapan anggaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Untuk lebih meminimalisir kecenderungan rendahnya pegawai dalam melakukan penyerapan anggaran, masukan dari pegawai harus dievaluasi secara hati-hati oleh atasan dan diharapkan pegawai dapat meningkatkan komunikasi yang positif dengan atasannya.
2. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan metode pengumpulan data dengan cara survei lapangan dan wawancara untuk menilai sejauh mana pengaruh antar variabel.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar dapat memilih responden yang lebih variatif dalam melakukan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh, Syukriy, Abdulah Halim. 2006. *Studi Atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan*. Jurnal Akuntansi Pemerintah Volume 2 Nomor 2, November.
- Ani Sri Rahayu. 2011. *Pengantar Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Bumi Aksara.
- As'ad, 2000. *Psikologi Industri*. Edisi: 4, Yogyakarta : Liberty.

- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, PPA FE UGM dan BPFE. Yogyakarta Ditjen Perbendaharaan, 2009, *Modul Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja*. Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI, Jakarta.
- Duwi Priyatno. 2013. *Mandiri Belajar Analisis Data Dengan SPSS*. Mediakom.
- Fajrina, Dina Swatu Farida. 2009. "Analisis Pengaruh Kepemimpinan, Disiplin Kerja dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang", Skripsi, Semarang : Universitas Diponegoro.
- Tjiptono, 2000. *Manajemen jasa*, Edisi Pertama. Andi offset, Yogyakarta.
- Herriyanto, 2012. *Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta*. Tesis Universitas Indonesia.
- Hidayat, Taufik dan Tin, Se. 2012. *Analisis Pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajer Pusat Laba di Warung Paskal Bandung*. Jurnal Akuntansi Vol.4 No.2 November 2012:187-199.
- Kreitner dan Kinicki, 2005. *Human Resources Management: An Information System Approach*. Reston Publishing Company, Inc., Virginia.
- Kuncoro M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah ; Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kurrohman, T. 2013. *Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang Berbasis Value For Money Di Kabupaten /Kota Jawa Timur*. Jurnal Dinamika Akuntansi, 5(1).
- La Ode, 2005, *Hubungan Fungsi dan Pengawasan DPR dengan BPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, CV. Utomo, Bandung.
- Locke and Luthans, Fred. 2002. *Perilaku Organisasi*. Diterjemahkan oleh Vivin Andika Yuwono dkk. Edisi Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Lawler. 2003. *Dampak Kinerja Terhadap Kepuasan Kerja*; Yogyakarta, Handbooks of Organization Amara Books.
- Mardi. 2008. "Peran Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal". Sekertaris Inspektorat Provinsi Sumatra Barat.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta. Penerbit Andi
- McCormick, Earnest J. and Tiffin. 2002. *Human Resource Management*, Singapore: Prentice-Hall.
- Miliasih, Retno. 2012. *Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga TA 2010 di Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru*. Tesis. Jakarta: Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.
- Muhammad Rizki Nur Kurniawan. 2011. *Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, dan Kepuasan Kerja terhadap*

- Kinerja Organisasi Publik*, studi pada pemerintah daerah kabupaten demak. (tidak diterbitkan) Jurusan S1 Jurusan Akuntansi FEB, Universitas Diponegoro.
- Prasetyono, Nurul Kompyurini, 2008. “*Analisis Kinerja Rumah Sakit Daerah Berdasarkan Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi Dan Akuntabilitas Publik (Survei Pada Rumah Sakit Daerah Di Jawa Timur)*”, Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XI di Pontianak.
- Primanda Resza. 2008. *Pengaruh Budaya Organisasi, Locus of Control dan Penerapan Sistem Informasi terhadap Kinerja Aparat Unit-Unit Pelayanan Publik*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Purbo, Onno W. 2008. “*Penilaian Individu*”. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Riyanto, Setyo. 2002. *Pengaruh Komitmen dan Kompetensi Pegawai terhadap Kepuasan Pelanggan dan Nilai Pelayanan Serta Dampaknya terhadap Loyalitas Pelanggan Suatu Survei pada Industri Jasa Kurir di Pulau Jawa, Disertasi Doktor*. Bandung: Universitas Padjajaran
- Rosjidi. 2001. *Akuntansi sektor Publik. Kerangka, Standart dan Metode*, Penerbit Aksara Satu. Surabaya.
- Sadeli, D. 2008 . *Profesionalitas Aparat Pengawasan Fungsional Intern Terhadap Pelaksanaan Audit Pemerintahan dan Implikasinya kepada Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Daerah*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 10 (2), 101-111.
- Salvia. 2008. *Pengaruh Pengawasan, Inspektorat dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja manajerial SKPD*. Skripsi. Universitas Negeri Padang.
- Sari, R. N. 2015. *Pengaruh Pengawasan Inspektorat dan Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris Instansi Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar)*. Jurnal Akuntansi.
- Siagian, Sondang P. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Verawati. 2009. *Hubungan Locus of Control dengan Perilaku Kesehatan Pada Masyarakat Perdesaan*. Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara.
- Wijaya, G. P dan Made, I. 2013. *Implementation Off Free Education In Relation To School Management At Public Junior High School 5 Denpasar*. E- Jurnal Of Cultural studies.